

Kerja Keras, Antarkan Sintang Raih Opini WTP

Sub Bagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



TERIMA LAPORAN: Bupati Sintang Milton Crosby didampingi Ketua DPRD Harjono Bejang menerima hasil laporan keuangan dari Ketua BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, yang memberikan penilaian WTP bagi Sintang untuk laporan keuangan 2012.



TANDATANGAN: Bupati Sintang menandatangani berita acara penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan disaksikan ketua DPRD Sintang dan ketua BPK RI Perwakilan Kalbar.

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Sintang atas pengelolaan keuangan tahun 2012. Predikat tersebut tidak datang dengan sendirinya, namun lahir atas komitmen dan kerja keras Pemkab Sintang. Predikat WTP sekaligus menjadi ikiran sejarah bagi Sintang. Lantaran predikat tersebut belum pernah diraih. Namun berkat kerja keras semua unsur SKPD dibawah kepemimpinan Milton Crosby, seba-

gai bupati, laporan keuangan dengan predikat WTP mampu dicapai Sintang. "Kami merasa bangga atas keberhasilan dalam meraih predikat WTP tersebut, karena belum pernah mendapatkannya. Pada tahun 2006, kami disclaim, tahun 2007 sampai 2011 hanya mendapatkan WDP dan pelaksanaan tahun anggaran 2012 bisa mendapatkan WTP," kata Milton. Ia pun berterima kepada seluruh kepala dinas, badan, kantor, camat dan lurah yang telah bekerja keras sehingga Sintang

bisa mendapatkan predikat WTP. Selain itu, berkat pengawasan secara berkesinambungan, termasuk dengan dukungan DPRD Sintang. "Ini menjadi tonggak penting untuk terus melanjutkan reformasi birokrasi, dengan muara transparansi dalam pelaporan keuangan," ungkap Milton.

Bupati juga menyampaikan, untuk meraih predikat WTP tersebut, pihaknya selalu melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh jajaran SKPD. Dalam setiap pertemuan dengan SKPD, pihaknya selalu mengingatkan untuk memanfaatkan anggaran dengan benar agar tepat sasaran dan tidak sampai menimbulkan masalah dengan unsur penegak hukum. "Kepada SKPD selalu diingatkan untuk tidak macam-macam. (Kerja) yang lurus saja bisa salah, apalagi macam-macam," ujarnya.

"Saya melihat ada lima faktor yang tidak bisa dilepaskan atas predikat WTP yang dicapai Sintang. Pertama, komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kedua disiplin dan kerja keras SKPD, ketiga kekompatan, kebersamaan serta kerjasama

antara Pemkab Sintang dan DPRD, keempat dukungan dari masyarakat, kelima bimbingan intensif dan konstruktif BPK dan BPKP," kata Milton.

Ia menambahkan, mempertahankan predikat WTP akan menjadi tantangan paling berat. Karena itu, sistem pelaporan keuangan akan terus diperketat. Bahkan diupayakan dibangun secara online, supaya laporan keuangan terus dapat terpantau. Kemudian menambah tenaga akunting, dengan merekrut pegawai maupun meningkatkan kemampuan sumber daya yang telah dimiliki.

Ketua DPRD Sintang Harjono Bejang mengatakan, keterlibatan pihaknya dalam pengawasan penggunaan keuangan negara tersebut karena bagian dari penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meski demikian, pihaknya lebih mengutamakan komunikasi agar penggunaan keuangan negara yang dilaksanakan aparat pemerintah lebih tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tanggung jawab pengawasan kami intensifkan dengan komunikasi," kata dia.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo menjelaskan, pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan ini dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan rapor dari pengelolaan keuangan daerah. "Selama kami memeriksa ada temuan pada sistem pengendalian dan ketidakpatuhan pada aturan. Untuk Kabupaten Sintang kami memberikan opini WTP. Dan sampai saat ini hanya Kota Pontianak dan Kabupaten Sintang saja yang sudah mendapatkan WTP," ungkap Adi Sudibyo.

Namun predikat tersebut bukan sebuah "hadiah", melainkan hasil dari kerja keras Pemkab dan DPRD Sintang dalam mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan negara. BPK Kalbar mengharap, Pemkab Sintang mampu mempertahankan predikat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan negara tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Biasanya mempertahankan predikat ini sulit. Maka kami berpesan peranan inspektorat harus diperkuat. Kunci untuk mendapatkan predikat WTP adalah komitmen Kepala Daerah dan DPRD," tambah Adi.

Opini WTP atau Unqualified Opinion artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan arus kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Sedangkan istilah Wajar dimaksudkan, bahwa laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjajaran serta lengkap informasinya.

Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan.

Predikat WTP, secara simbolis diterima Bupati Sintang dan Ketua DPRD dari Kepala BPK Perwakilan Kalbar di Jalan A. Yani Pontianak, Selasa, 11 Juni 2013 lalu. (**)

